

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL



**LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
TAHUN 2019**

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

PENILAIAN -1 : MANAJEMEN PERUBAHAN (5%)

PENILAIAN		Bobot	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindakanjuit dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
1	Tim Kerja (1)	1,0				20%			
	a		Y/T	Y	0.5	38%	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah membentuk Struktur Organisasi Tim Pembangunan ZI WBK/WBBM	SK KPN tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pemangunan ZI WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja
	b		A/B/C	A	0,5	38%	Penentuan Anggota Struktur Organisasi Tim Zona Integritas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memenuhi Prosesur dan mekanisme yang jelas	Dokumen Prosedur Penentuan Anggota Tim Persiapan Penilai Internal ZI	A. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas; B. Sebagian menggunakan prosedur; C. Tidak di seleksi
2	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)	1,0				20%			
	a		Y/T	Y	0.25	25%	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah membuat Rencana Kerja Zona Integritas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Dokumen Rencana Kerja ZI	Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas

	b	Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?		A/B/C	B	0,35	35%	Semua target-target prioritas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah relevan dengan WBK/WBBM	Dokumen target-target prioritas	A. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; B. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; C. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
	c	Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?		Y/T	Y	0,25	25%	Media Sosialisasi WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal melalui media layar informasi dan spanduk	- Screenshot Website PN Kuala Tungkal - Banner WBK/WBBM - Foto Komitmen Bersama - Dokumentasi Rapat	Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)		2,0				40%			
	a	Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?		A/B/C/D	B	0,5	25%	Semua kegiatan Pembangunan ZI pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah dilaksanakan sesuai dengan rencana	- Dokumen Rencana Kerja ZI - Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI	A. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; B. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; C. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; D. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana

	b	Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas		A/B/C/D	A	0,75	38%	Laporan Monitoring dan Evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan unit WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI	<ul style="list-style-type: none"> A. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan; B. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan; C. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran; D. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan
	c	Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?		A/B/C/D	B	0,5	25%	Semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK/WBBM pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah ditindaklanjuti	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI	<ul style="list-style-type: none"> A. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; B. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; C. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; D. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti
4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)		1,0				20%			

a	Apakah pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?	Y/T	Y	0,2	20%	Ya, Pimpinan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memberi teladan nyata	<ul style="list-style-type: none"> - Prin out absen dan manual - Foto Apel, rapat bulanan 	Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata misalnya mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain
b	Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?	Y/T	Y	0,25	25%	Agen perubahan sudah ditetapkan melalui SK KPN, Penunjukan Role Model Pengembangan Perilaku Budaya Kerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> - SK Agen perubahan - Dokumentasi rapat role model dan agen perubahan 	Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan
c	Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?	Y/T	Y	0,2	20%	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah melaksanakan pembangunan budaya kerja dan pola pikir melalui program sertifikasi hakim dan pelatihan, penunjukan petugas PTSP dan SSK Penunjukan Tim Asesmen APM	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen SK Penunjukan Tim Audit Asesmen APM - Dokumen Pemanggilan Sertifikat Hakim - Dokumen SK Penunjukan Petugas PTSP - Dokumen rapat sosialisasi budaya kerja - Dokumen rapat standar layanan Prima Aparat Pengadilan Khususnya PTSP - Dokumen apel, senam, bakti - 5R, 3S, Budaya Malu - SK Jam kerja, SK Pakaian Dinas 	Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
d	Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?	A/B/C/D	A	0,25	25%	Seluruh jajaran pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari seluruh jajaran diakomodasikan dalam keputusan rapat Pembangunan ZI	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen hadir rapat koordinasi Pencanaan Pembangunan Zona Integritas - Dokumen Rapat Pembuatan Rencana Aksi - Dokumen Rapat Pembinaan 	<p>A. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan;</p> <p>B. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>C. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>D. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM</p>
JUMLAH NILAI		5		4.5	90%			

KETERANGAN :

- *Kolom nilai diisi sesuaikan saat tim penilai melakukan penilaian (Nilai tidak boleh melebihi Bobot per pertanyaan)*
- *Cara Pengisian kolom Nilai dan %*

NILAI

$$\frac{\text{—————}}{\text{BOBOT}} \times 100 \% = \text{..... } \%$$

BOBOT



**LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
TAHUN 2019**

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

PENILAIAN -2 : PENATAAN TATALAKSANA (5%)

PENILAIAN		Bobot	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindaklanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
1	prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)	1,5				30%			
a	Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi		A/B/C/D	B	0,3	20%	Semua Unit SOP pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Peta Bisnis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal - Dokumen Daftar SOP Pengadilan Negeri Kuala Tungkal - Dokumen Inovasi yang selaras yaitu Penerapan SOP terhadap Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang didukung oleh Aplikasi Pelayanan Pendukung 	<ul style="list-style-type: none"> A. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; B. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; C. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; D. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
b	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		A/B/C/D	B	0,3	20%	Unit pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga meklakukan inovasi pada SOP yang diterapkan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Monitoring SOP Perdata - Dokumen Monitoring SOP Pidana - Dokumen Sosialisasi SOP 	<ul style="list-style-type: none"> A. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; B. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan ; C. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan ; D. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan

	c	Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi		A/B/C/D	B	0,5	33%	Seluruh SOP utama pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah dievaluasi dan telah ditindak lanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP Namun belum ditetapkan Masih Menunggu Keseragaman SOP Pelayanan Utama(Kepaniteraan)dari Ditjen Badan Peradilan Umum	Dokumen Daftar Hadir Rapat Evaluasi SOP,SK KPN Tentang Tim Evaluasi SOP	<p>A. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP;</p> <p>B. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP;</p> <p>C. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti;</p> <p>D. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi</p>
2	E-Office (2)		2,0				40%			
	a	Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	B	0,3	33%	Sistem Pengukuran Kinerja pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Telah menggunakan aplikasi SKP dan Kinerja penyelesaian perkara melalui Aplikasi SIPP	Dokumen SKP	<p>A. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;</p> <p>B. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan teknologi informasi;</p> <p>C. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi</p>
	b	Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	B	0,3	33%	Operasionalisasi Manajemen SDM pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Telah Menggunakan aplikasi SIKEP	Dokumen Aplikasi SIKEP	<p>A. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;</p> <p>B. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat;</p> <p>C. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi</p>
	c	Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?		A/B/C	B	0,3	33%	Pemberian Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Telah Menggunakan Teknologi Informasi dalam Aplikasi Siwas,Aplikasi PTSP,Aplikasi SIPP	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Aplikasi Siwas - Dokumen Aplikasi SIKEP - Dokumen Aplikasi SIPP - Dokumen SOP PTSP 	<p>A. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;</p> <p>B. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat;</p> <p>C. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi</p>

	d	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?		A/B/C/D	B	0,3	33%	Laporan Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran unit kerja,operasional SDM,dan pemberian layanan kepada publik pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah dilakukan perbulan melalui aplikasi Komdanas	Dokumen Laporan Komadanas Bulanan	A. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan; B. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan; C. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran; D. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan
3	Keterbukaan Informasi Publik (1,5)		1,5				30%			
	a	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan		Y/T	Y	0,5	33%	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sudah diterapkan	Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tentang Petugas Informasi dan PPID Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan
	b	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		Y/T	Y	0,5	33%	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tentang Petugas Informasi dan PPID Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
JUMLAH NILAI			5				3.3			
KETERANGAN :										
<ul style="list-style-type: none"> Kolom nilai diisi sesuaikan saat tim penilai melakukan penilaian (Nilai tidak boleh melebihi Bobot per pertanyaan) Cara Pengisian kolom Nilai dan % 										
NILAI										

_____ X 100 % = %
BOBOT



**LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
TAHUN 2019**

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

PENILAIAN -3 : PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15%)

PENILAIAN		Bobot	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindaklanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)	2,0				13%			
a	Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?		Y/T	Y	0.5	25%	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing masing jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang penunjukan Tim Analisis dan Jabatan Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal - Dokumen Analisis beban Kerja - Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai - Dokumen Peta Jabatan - Dokumen Anjab Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal - Dokumen Anjab Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 	Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
b	Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?		A/B/C/D	B	0.5	25%	Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - SK Penunjukan Pendamping Panitera Pengganti (Magang) - Dokumen Penerimaan Calon Hakim Ad Hoc - Dokumen Penerimaan Calon Hakim 	<p>A. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;</p> <p>B. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;</p> <p>C. Jika sebagian kecil penempatan pegawai</p>

										hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; D. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
	c	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?		Y/T	Y	0.5	25%	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	- Dokumen DUK Tahun 2018 - Dokumen Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
2	Pola Mutasi Internal (2)		2,0				13%			
	a	Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?		Y/T	Y	0.5	25%	Telah Dilakukan mutasi pegawai antar jabatan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan satuan kerja dibawahnya sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai	- Dokumen Surat Pengusulan Formasi Jabatan pada Pengadilan Negeri - SK Rolling Staf 2018 - SK Rolling Staf 2019	Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai

	b	Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?		A/B/C/D	B	0.5	25%	Semua mutasi pegawai antar jabatan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi	Dokumen Rapat Baperjakat	A. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan pusat dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini; B. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan pusat; C. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan pusat; D. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan pusat
	c	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?		Y/T	Ya	0.5	25%	Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja (Dokumen Rapat Evaluasi Baperjakat)	Dokumen Rapat Baperjakat	Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)		3,0							
	a	Apakah Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi ?		Y/T	T			Ya, jika sudah dilakukan Training Need Anallisis Untuk pengembangan kompentensi yang merupakan kewenangan Tugas dan fungsi Balitbang Badan diklat Mahkamah Agung R.I	- Dokumen Analisa beban Kerja - Dokumen Proyeksi Kebutuhan Pegawai - Dokumen Peta Jabatan - Dokumen Anjab Sekretaris - Dokumen Anjab Panitera - Dokumen Rapat Hakim, Rapat Panmud dan Panitera Pengganti, serta Rapat Jurusita/Jurusita Pengganti	Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi

	b	Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?		A/B/C/D	B	0.4	13%	Semua rencana pengembangan kompetensi pegawai pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	- Dokumen Analisa beban Kerja - Dokumen Proyeksi Kebutuhan pegawai - Dokumen Peta Jabatan - Dokumen Anjab Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal - Dokumen Anjab Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	<p>A. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;</p> <p>B. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;</p> <p>C. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;</p> <p>D. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai</p>
	c	Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan		A/B/C/D	A	0.5	17%	Persentase Kesenjangan kompetensi pegawai pada standar kompetensi yang ditetapkan sebesar (26%)	- Dokumen Analisa beban Kerja - Dokumen Proyeksi Kebutuhan pegawai - Dokumen Peta Jabatan - Dokumen Anjab Sekretaris Pengadilan Negeri Kuala Tungkal - Dokumen Anjab Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	<p>A. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%;</p> <p>B. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% ;</p> <p>C. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75%;</p> <p>D. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%</p>

d	Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya		A/B/C/D	A	0.5	17%	Seluruh pegawai di unit kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun kemampuan kompetensi lainnya dengan mengajukan diusulkan untuk mengikuti Diklat Teknis dan non Teknis, Diklat PIM III, IV kepada Badan Diklat Mahkamah Agung R.I.	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Usulan Diklat PIM IV & III - Dokumen Usulan Diklat Bendahara dan Jasa - Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa - Sertifikat Pelatihan Hakim 	<ul style="list-style-type: none"> A. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; B. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; C. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; D. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
e	Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?		A/B/C/D	C	0.4	13%	Unit Kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Surat Tugas Mengikuti Diklat 	<ul style="list-style-type: none"> A. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai; B. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai; C. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai; D. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai

	f	Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?		A/B/C/D	A	0.6	20%	Laporan Monitoring evaluasi terhadap pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan Tahunan (Laporan Tahun 2017 dan renstra Pengadilan Negeri Kuala Tungkal)	- Dokumen Laporan Tahunan - Dokumen Rencana Strategis	<p>A. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan;</p> <p>B. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan;</p> <p>C. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran;</p> <p>D. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan tahunan</p>
4	Penetapan kinerja individu (4)		4,0				27%			
	a	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		A/B/C/D	A	0.75	19%	Penetapan Kinerja Individu Dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahunan	Dokumen PKT Tahun 2017	<p>A. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;</p> <p>B. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;</p> <p>C. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;</p> <p>D. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi</p>

	b	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya		A/B/C/D	A	0.75	19%	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	Dokumen Target SKP Kasabag Kepegawaian dan Ortala	<p>A. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ;</p> <p>B. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ;</p> <p>C. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ;</p> <p>D. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya</p>
	c	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		A/B/C/D/E	A	0.75	19%	Pengukuran kinerja individu semesteran	<p>- Dokumen SKP Panitera</p> <p>- Dokumen SKP Sekretaris</p>	<p>A. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan;</p> <p>B. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan;</p> <p>C. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran;</p> <p>D. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan;</p> <p>E. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan</p>
	d	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)		A/B/C/D	A	0.75	19%	Hasil penilaian kinerja individu pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah dijadikan dasar melalui pemberian reward sebagai role model	<p>- Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tentang Penunjukkan Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2018</p> <p>- Sertifikat Role Model</p>	<p>A. Hasil penilaian kinerja individu seluruhnya telah dijadikan dasar pemberian reward;</p> <p>B. Hasil penilaian kinerja individu sebagian besar telah dijadikan dasar pemberian reward;</p> <p>C. Hasil penilaian kinerja individu sebagian kecil telah dijadikan dasar pemberian reward;</p> <p>D. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward</p>
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)		3,0				20%			

	a	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan		A/B/C/D	B	2.5	83%	Unit Kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.	- Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Ketentuan Jam Kerja pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal - SK Keamanan dan Ketertiban - SK Ketentuan Pakaian Dinas - SK Penanggung Jawab Daftar Hadir - Absensi Manual, Fingerprint dan Rekap Daftar Hadir - Contoh Potongan Remun - Dokumen Sosialisasi 01/Maklumat/KMA/IX/2017	A. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; B. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan instansi pusat; C. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan instansi pusat; D. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan instansi pusat
6	Sistem Informasi Kepegawaian (1)		1,0				7%			
	a	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala		A/B/C/D	A	1	100%	Data Informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan	- Dokumen Data SIKEP terlampir - Bezzeting Triwulan IV 2018	A. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan; B. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara triwulan; C. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara semesteran; D. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara tahunan
JUMLAH NILAI			15			11,9	79%			

KETERANGAN :

- Kolom nilai diisi sesuaikan saat tim penilai melakukan penilaian (Nilai tidak boleh melebihi Bobot per pertanyaan)
- Cara Pengisian kolom Nilai dan %

NILAI

$$\frac{\text{NILAI}}{\text{BOBOT}} \times 100 \% = \dots\dots\dots \%$$

BOBOT



**LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
TAHUN 2019**

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

PENILAIAN -4 : PENGUATAN AKUNTABILITAS (10%)

PENILAIAN		Bobot	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindaklanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan	
1	Keterlibatan pimpinan (5)	5				50%				
	a	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan?		Y/T	Y	1	20%	Ya, Pimpinan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Rapat Penyusunan Penetapan Kinerja - Dokumen Rapat Penyusunan Target IKU dan Renstra - Dokumen Rapat Perencanaan - Dokumen Rapat Persiapan Laporan LkjiP 2018 - Dokumen Rapat Sosialisasi Aplikasi Perencanaan Program dan Anggaran Terintegrasi - Dokumentasi Rapat DC ZI Area Peningkatan Akuntabilitas 	Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
	b	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja?		Y/T	Y	1.5	30%	Ya, Pimpinan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan kinerja (dokumen rapat terlampir)	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Rapat Perencanaan - Dokumen Rapat Sosialisasi Aplikasi Perencanaan Program dan anggaran terintegrasi - Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 - Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2018 	Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
	c	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala ?		Y/T	Y	1.5	30%	Ya, Pimpinan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memantau pencapaian kinerja secara berkala	- Dokumen Evaluasi atas penyelenggaraan Program dan Kegiatan Triwulan IV Tahun 2015	Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

										<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2015 - Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2016 - Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017 	
2	Pengelolaan Kinerja (5)	Akuntabilitas	5,0				50%				
a	Apakah dokumen perencanaan sudah ada ?			A/B/C	B	0.5	10%	Unit kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memiliki dokumen perencanaan (dokumen SAKIP terlampir) dan telah di upload Aplikasi E-SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) - Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2017 - Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2018 - Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2017 - Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2018 - Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018 - Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017 - Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 - Dokumen Reviu Indikator kinerja Utama (IKU) - Dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 	<ul style="list-style-type: none"> A. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ; B. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ; C. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan 	
b	Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ?			A/B/C/D	B	0.5	10%	Dokumen Perencanaan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah berorientasi hasil (Dokumen SAKIP terlampir)	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) - Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2017 - Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan 2018 - Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2017 - Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 2018 	<ul style="list-style-type: none"> A. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; B. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; C. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; D. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil 	

									2018 - Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018 - Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017 - Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 - Dokumen Reviu Indikator kinerja Utama (IKU) - Dokumen Reviu Rencana Strategis (RENSTRA)	
	c	Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)		A/B/C	B	0.5	10%	Telah terdapat indikator Kinerja Utama (IKU) Dokumen IKU Terlampir)	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	A. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; B. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan instansi pusat ; C. Jika unit kerja belum memiliki IKU
	d	Apakah indikator kinerja telah SMART		A/B/C/D	B	0.5	10%	Indikator kinerja telah mengikuti kaidah SMART(Dokumen IKU Terlampir)	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	A. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; B. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ; C. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ; D. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART
	e	Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu		Y/T	Y	0.5	10%	Ya,Laporan kinerja telah disusun tepat waktu(Dokumen Terlampir)	- Dokumen Surat pengantar - Dokumen Surat Pengadilan Tinggi Jambi	Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
	f	Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja		A/B/C/D	B	0.5	10%	Pelaporan telah diberikan informasi tentang kinerja (Laporan kinerja terlampir)	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	A. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; B. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; C. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; D. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja

	g	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		A/B/C/D	B	0.5	10%	Mengikutsertakan SDM Pada Sub bagian PTIP untuk mengikuti Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pusdiklat Mahkamah Agung R.I.	Dokumen Pemanggilan Diklat Perencanaan	<p>A. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;</p> <p>B. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;</p> <p>C. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ;</p> <p>D. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja</p>
	h	Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten		A/B/C	B	0.5	10%	SDM yang telah memiliki sertifikat DIKLAT Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sertifikasi pengelola teknis perencanaan terlampir)	<p>- Dokumen Pemanggilan Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>- Dokumen Sertifikat Diklat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>A. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten ;</p> <p>B. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten ;</p> <p>C. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten</p>
JUMLAH NILAI			10			9	90%			

KETERANGAN :

- Kolom nilai diisi sesuaikan saat tim penilai melakukan penilaian (Nilai tidak boleh melebihi Bobot per pertanyaan)
- Cara Pengisian kolom Nilai dan %

NILAI

$$\frac{\text{NILAI}}{\text{BOBOT}} \times 100 \% = \dots\dots\dots \%$$

BOBOT



**LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
TAHUN 2019**

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

PENILAIAN -5 : PENGUATAN PENGAWASAN (15%)

PENILAIAN		Bobot	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindakan lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
1	Pengendalian Gratifikasi (3)	3,0				20%			
	a	Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	A/B/C	B	1	33%	Unit Kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah Publis campign telah dilakukan secara berkala melalui Layar Informasi dan Liputan Perancangan Pembangunan Zona Intergritas	- Dokumen Layar Informasi Pengendalian Gratifikasi - WBK/WBBM Pegadilan Negeri Kuala Tungkal	A. Public campaign telah dilakukan secara berkala; B. Public campaign dilakukan tidak secara berkala; C. Belum dilakukan public campaign
	b	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	A/B/C	A	1,5	33%	Unit kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Pemanggilan para pihak yang akan bersidang melalui meja PTSP dengan media audio yang terintegrasi dengan SIPP	- Dokumen Surat Keputusan Tim Pengendali Gratifikasi Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal - Screenshot aplikasi Panggilan Sidang	A. Jika unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; B. Jika unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi ; C. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
2	Penerapan SPIP (3)	3,0				20%			

	a	Telah dibangun lingkungan pengendalian		A/B/C/D	A	1	33%	Unit Kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	Dokumen SK KPN Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	<p>A. Jika unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;</p> <p>B. Jika unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat;</p> <p>C. Jika unit kerja telah membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat;</p> <p>D. Jika unit kerja telah membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat</p>
	b	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan		A/B/C/D	A	1	33%	Unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja (Dokumen dari Pengawasan Dan Pembinaan)	Dokumen Pembinaan Maklumat KMA	<p>A. Jika telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;</p> <p>B. Jika telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat;</p> <p>C. Jika telah melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat;</p> <p>D. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat</p>

	c	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		A/B/C	A	1	15%	Jika unit kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga memuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Pembinaan Maklumat KMA - Absensi Ruangan - Agenda Keluar Masuk Pegawai oleh Security 	<p>A. Jika unit kerja telah melakukan seluruh kegiatan pengendalian yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;</p> <p>B. Jika unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi ;</p> <p>C. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi</p>
	d	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		A/B/C	A	1	15%	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepadaseluruh pihak terkait	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen SK Penunjukkan Hakim Pegawai Bidang dan Kimwasmat - Dokumen evaluasi dari hakim Pengawas Bidang 	<p>A. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait;</p> <p>B. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait;</p> <p>C. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI</p>
3	Pengaduan Masyarakat (3)		3,0				20%			

a	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		A/B/C/D	A	1	33%	Unit Kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah mengimplentasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakterisitik unit kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen SK KPN tentang Penunjukkan Tim Pengelola Meja Pengaduan - Dokumen Formulir Pengaduan (Aplikasi SIWAS) 	<ul style="list-style-type: none"> A. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; B. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat; C. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat; D. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat
b	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		A/B/C/D	A	1	33%	Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Dokumen Lapbul Penyelesaian Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> A. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; B. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; C. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; D. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit
c	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		A/B/C/D	B	0.5	15%	Belum ada Pengaduan Masyarakat Yang Masuk Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sehingga tidak dapat di evaluasi	Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Whistle Blowing System (WBS)	<ul style="list-style-type: none"> A. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan; B. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan; C. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran; D. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan tahunan

	d	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		A/B/C	B	0.5	15%	Belum ada Pengaduan Masyarakat Yang Masuk Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sehingga tidak dapat di evaluasi	Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Whistle Blowing System (WBS)	A. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; B. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; C. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti unit kerja
4	Whistle-Blowing System (3)		3,0				20%			
	a	Apakah <i>Whistle Blowing System</i> sudah di internalisasi?		Y/T	Y	0.75		White Blowing System telah di internalisasi melalui sosialisasi	- Dokumen Rapat Sosialisasi Whistle Blowing System - Dokumen Absensi Rapat Sosialisasi Whistle Blowing System	Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja
	b	<i>Whistle Blowing System</i> telah diterapkan		A/B/C/D	B	0.5	33%	Unit Kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System Sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik Unit kerja	Dokumen SK KPN Tentang Tim Implementasi Aplikasi SIWAS MARI	A. Jika unit kerja telah menerapkan seluruh kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; B. Jika unit kerja telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat; C. Jika unit kerja telah menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat; D. Jika unit kerja telah menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat

	c	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>		A/B/C/D	B	0.5	33%	Belum adanya evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System karena belum ada Pengaduan Masyarakat	Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Whistle Blowing System (WBS)	<ul style="list-style-type: none"> A. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan; B. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan; C. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran; D. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan
	d	Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti		A/B/C/D	B	0.5	33%	Belum adanya evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System karena belum ada Pengaduan Masyarakat	Laporan Monitoring Dan Evaluasi Penanganan Pelayanan Pengaduan Masyarakat Dan Whistle Blowing System (WBS)	<ul style="list-style-type: none"> A. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; B. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; C. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; D. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti unit kerja
5	Penanganan Benturan Kepentingan (3)		3,0				20%			
	a	Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama		Y/T	Y	0.6	33%	Unit Kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Dokumen SK KPN Kuala Tungkal tentang satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
	b	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi		A/B/C/D	B	0.45	33%	Penanganan Benturan Kepentingan Disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja	Dokumen Rapat Sosialisasi Benturan Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> A. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja; B. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja; C. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja; D. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja

c	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		A/B/C/D	C	0.3	33%	Penanganan benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja	Dokumen Rapat Sosialisasi Benturan Kepentingan	A. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja ; B. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja; C. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja; D. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja
d	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		A/B/C	C	0.3	33%	Penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan	A. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; B. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja; C. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja
e	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		A/B/C/D	C	0.3	33%	Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Dokumen Monitorng dan Evaluasi Benturan Kepentingan	A. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; B. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; C. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; D. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja
JUMLAH NILAI		15			13,8	92%			
KETERANGAN :									
<ul style="list-style-type: none"> Kolom nilai diisi sesuaikan saat tim penilai melakukan penilaian (Nilai tidak boleh melebihi Bobot per pertanyaan) Cara Pengisian kolom Nilai dan % <p style="margin-left: 20px;">NILAI ———— X 100 % = %</p> <p style="margin-left: 20px;">BOBOT</p> 									



**LEMBAR KERJA EVALUASIZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
TAHUN 2019**

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

PENILAIAN -6 : PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10%)

PENILAIAN		Bobot	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindaklanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
1	Standar Pelayanan (3)	3,0				30%			
	a	Terdapat kebijakan standar pelayanan		A/B/C	B	0.5	17%	Unit Kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga mebuat inaovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakterisitik unit kerja - Dokumen Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tinggi - Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang petugas pengelola PTSP Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal - Dokumentasi PTSP pada PN Kuala Tungkal	A. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; B. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan instansi pusat ; C. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan
	b	Standar pelayanan telah dimaklumkan		A/B/C/D	B	0.5	17%	Unit Kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unti kerja - Dokumen Maklumat Pelayanan Tentang Humas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal - Dokumen Maklumat Pelayanan tentang meja informasi (DESKINFO) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal - Dokumen Maklumat Pelayanan	A. Jika unit kerja telah memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; B. Jika unit kerja telah memaklumkan

									tentang Perpustakaan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	<p>seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat;</p> <p>C. Jika unit kerja telah memaklumkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat;</p> <p>D. Jika unit kerja telah memaklumkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat</p>
c	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan		A/B/C/D	B	0.5	17%	Unit Kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja	<p>- Dokumen Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang pedoman standar Pelayanan Pemberikan Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar meja Inforamsi Di Pengadilan</p> <p>- Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Penunjukan Petugas Pengelola PTSP Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal</p>	<p>A. Jika unit kerja telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;</p> <p>B. Jika unit kerja telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat;</p> <p>C. Jika unit kerja telah menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat;</p> <p>D. Jika unit kerja telah menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat</p>	
d	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP		A/B/C	B	0.5	17%	Unit Kerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja beinsiatif melakukan reivu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	<p>- Dokumen SK Penunjukkan Tim Evaluasi atau Penyesuaian SOP</p> <p>- Dokumen Undangan Rapat Evaluasi SOP</p>	<p>A. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang dilakukan instansi pusat dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ;</p> <p>B. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang dilakukan instansi pusat ;</p> <p>C. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang dilakukan instansi pusat</p>	

2	Budaya Pelayanan Prima (3)		3,0				30%			
a	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima		A/B/C/D	B	0.5	17%	Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang pedoman standar Pelayanan Pemberikan Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar meja Inforansi Di Pengadilan - Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Penunjukan Petugas Pengelola PTSP Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal - Dokumentasi PTSP Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 	<ul style="list-style-type: none"> A. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima; B. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima; C. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima; D. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima 	
b	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		A/B/C	B	0.5	17%	Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial)	Dokumen Website Pengadilan Negeri Kuala Tungkal http://pn-kualatungkal.go.id untuk mempermudah akses informasi	<ul style="list-style-type: none"> A. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb); B. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb); C. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media 	
c	Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standard		A/B/C	B	0.5	17%	Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelakasan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen SK Penunjukan Panitia Pemilihan Role Model - Dokumen SK penunjukkan Role Model 	<ul style="list-style-type: none"> A. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan; B. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan ; 	

										C. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
	d	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		A/B/C/D	B	0.5	17%	Telah Terdapat sarana layanan terpadu yaitu dengan terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Dokumen SK Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Susunan Penanggung Jawab Tugas Pelayanan Informasi pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	A. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu; B. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu; C. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu; D. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu
	e	Terdapat inovasi pelayanan		A/B/C/D	B	0.5	17%	Telah Terdapat Inovasi Pelayanan melalui adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Dokumen Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang pedoman standar Pelayanan Pemberikan Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar meja Inforamsi Di Pengadilan - Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Penunjukan Petugas Pengelola PTSP Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal - Dokumentasi PTSP Pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	A. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain; B. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain; C. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain ; D. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan
3	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)		4,0				40%			
	a	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		A/B/C	A	1.5	38%	Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sebesar 82.90 yang berada pada kategori "Sangat Baik" Berdasarkan Laporan Hasil Survey Indek Kepuasan	- Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 - Dokumen SK Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Tim Survei indeks kepuasan Pelanggan/Masyarakat pada	A. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala; B. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala; C. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

								Masyarakat pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	
	b	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		A/B/C	B	1	25%	Hasil Survey kepuasan masyarakat ini dapat diakses langsung melalui website Pengadilan Negeri Kuala Tungkal	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018	A. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb); B. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb); C. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media
	c	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat		A/B/C/D	B	1	25%	Tindak lanjut atas survey hasil kepuasan masyarakat adanya rekomendasi yang didasarkan atas saran-saran yang diberikan oleh responden sebagaimana disampikan dalam laporan IKM Tahun 2018	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018	A. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat; B. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat; C. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat; D. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
JUMLAH NILAI			10			8	80%			

KETERANGAN :

- Kolom nilai diisi sesuaikan saat tim penilai melakukan penilaian (Nilai tidak boleh melebihi Bobot per pertanyaan)
- Cara Pengisian kolom Nilai dan %

NILAI

$$\frac{\text{NILAI}}{\text{BOBOT}} \times 100 \% = \dots\dots\dots \%$$

BOBOT



**LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
TAHUN 2019**

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

TOTAL PENGUNGKIT(60 %)

PENILAIAN		Bobot	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindakan lanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
A.	PROSES (60)								
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	5%	-	-	4.5	90%	-	-	-
2.	PENATAAN TATALAKSANA	5%	-	-	3.3	66%	-	-	-
3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	15%	-	-	11.9	79%	-	-	-
4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10%	-	-	9.0	90%	-	-	-
5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15%	-	-	13.8	92%	-	-	-
6.	PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10%	-	-	8.0	80%	-	-	-
TOTAL PENGUNGKIT		60,0			50.5	84%			



**LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
TAHUN 2019**

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

TOTAL HASIL (40 %)

PENILAIAN		Bobot	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindaklanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
B.	HASIL (40)								
	I	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)	20%		20,0	50%			
	1	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	15,0	3.70	13.90	93%			Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi
	2	Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5,0	100%	5	100%	Temuan sebelumnya adalah 1. Usulan Satya Lencana belum diusulkan melalui aplikasi; 2. Satpam belum mengikuti pelatihan dan belum bersertifikat; 3. Belum ada laporan monitoring dan evaluasi kegiatan; Sudah ditindak lanjuti semuanya	1. Screenshot aplikasi dan usulan Satya Lencana; 2. Sertifikat bukti kelulusan Diksar Satpam; 3. Berita Acara Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan;	
	II	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)	20%		20,0	50%			
	1	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)	20,0	3.31	16.55	82%			Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan
TOTAL HASIL		40,0			35,45	92%			



**LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL
TAHUN 2019**

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NILAI PEMBANGUNAN ZI (100%)

PENILAIAN	Bobot	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Tindaklanjut dan Progres	Bukti Data Dukung	Keterangan
A. TOTAL PENGUNGKIT	60,0			50,5	84%			
B. TOTAL HASIL	40,0			35,45	92%			
NILAI PEMBANGUNAN ZI	100,0			85,95	88%			